

Integrasi Kesantunan Berbahasa dalam Komunikasi Politik Terhadap Tindak Tutur Pejabat Publik dalam Merespon Penolakan Kenaikan Pajak

Chintiah Lafaezah Sihaloho¹, Tesalonica Evelin Br Sitorus², Filomena Nova Julianti Sinurat³, Kezia Tarila Rubina Br Sitepu⁴, Ferdinand Simbolon⁵

^{1,2,3,4,5} Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa Dan Seni, Universitas Negeri Medan

Corresponding Author: Tesalonica Evelin Br Sitorus, e-mail: tesalonicaevelin218@gmail.com

Published: November , 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak tutur dan strategi kesantunan pejabat publik dalam merespons penolakan kenaikan pajak dari masyarakat melalui perspektif pragmatik. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis wacana pragmatik yang berfokus pada data berupa pernyataan pejabat Kabupaten Pati yang diambil dari media publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pejabat menggunakan tiga jenis tindak tutur, yaitu asertif, komisif, dan direktif, yang disampaikan dengan strategi bald-on-record atau langsung tanpa mitigasi. Strategi tersebut menegaskan wibawa dan kekuasaan penutur, namun mengabaikan prinsip kesantunan positif dan negatif yang dapat menjaga keharmonisan komunikasi. Akibatnya, komunikasi politik yang terbentuk bersifat otoritatif dan berpotensi menimbulkan jarak sosial antara pejabat dan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan strategi kesantunan berbahasa dalam komunikasi politik sangat penting untuk membangun citra positif, memperkuat legitimasi moral, serta menciptakan hubungan dialogis dan harmonis antara pemerintah dan publik.

Kata Kunci: Pragmatik, tindak tutur, kesantunan berbahasa, komunikasi politik, pejabat publik.

ABSTRACT

This study aims to analyze the speech acts and politeness strategies of public officials in responding to public opposition to tax increases from a pragmatic perspective. This study uses a descriptive qualitative approach with pragmatic discourse analysis methods, focusing on data in the form of statements by Pati Regency officials taken from public media. The results show that officials use three types of speech acts: assertive, commissive, and directive, delivered using a "bald-on-record" strategy, or directly without mitigation. This strategy asserts the speaker's authority and power, but ignores the principles of positive and negative politeness that can maintain harmonious communication. As a result, the resulting political communication is authoritative and has the potential to create social distance between officials and the public. This study concludes that the application of politeness strategies in political communication is crucial for building a positive image, strengthening moral legitimacy, and creating a dialogical and harmonious relationship between the government and the public.

Keywords: Pragmatics, speech acts, politeness, political communication, public officials.

PENDAHULUAN

Komunikasi pada dasarnya berasal dari bahasa Latin, yaitu *communico* yang artinya membagi, dan *communis* yang berarti membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Artinya, komunikasi menyarankan bahwa suatu pikiran, suatu makna, atau suatu pesan dianut secara sama (Sampurna, 2024). Komunikasi politik adalah keseluruhan keputusan kondisional pada saat ini tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan politik pada masa depan (Lopulalan, 2023). Karena pada kenyataannya keberadaan pemimpin politik sangat dibutuhkan dalam setiap aktivitas kegiatan komunikasi politik. Komunikasi politik sifatnya *multi-disciplinary study*, terutama dalam kaitan antara proses komunikasi dan proses politik. Dalam konteks politik mengacu pada pendapat Graceau dan Nimmo (Lopulalan, 2023), proses politik merupakan pola interaksi yang menghubungkan antara warga negara dengan pembuat keputusan baik dalam konteks, kesetaraan, kerjasama ataupun dalam konteks konflik. Hal ini dapat dimaknai bahwa pola interaksi antara warga negara dengan pemerintah dalam suatu arena kebijakan merupakan sebuah proses komunikasi dalam konteks politik

Fungsi komunikasi politik dapat dibedakan kepada dua bagian. Pertama, fungsi komunikasi politik yang berada pada struktur pemerintah (suprastruktur politik) atau disebut pula dengan istilah *the governmental political sphere*, berisikan informasi yang menyangkut kepada seluruh kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Isi komunikasi ditujukan kepada upaya untuk mewujudkan loyalitas dan integritas nasional untuk mencapai tujuan negara yang lebih luas. Suprastruktur Politik, adalah sebuah kegiatan lembaga yang mengundang pada kegiatan terhadap komunikasi dan politik suprastruktur dengan fungsi pada lembaga pemerintah yang berkomunikasi untuk mencapai tujuan dalam pembangunan nasional. Kedua, fungsi yang berada pada struktur masyarakat (infrastruktur politik) yang disebut pula dengan istilah *the sociopolitical sphere*, yaitu sebagai agregasi kepentingan dan artikulasi kepentingan, dimana kedua fungsi tersebut sebagai proses komunikasi yang berlangsung di antara kelompok asosiasi dan proses penyampaian atau penyaluran isi komunikasi terhadap pemerintah dari hasil agregasi dan artikulasi tersebut. Infrastruktur politik adalah lembaga politik atau mesin politik informasi yang berperan secara tidak langsung dalam pengambilan kebijakan-kebijakan politik oleh suprastruktur politik (Lopulalan, 2023). Sehubungan dengan itu, Menurut Tarigan (dalam Purwanti, 2025), Pragmatik merupakan cabang linguistik yang merupakan mempelajari makna dalam konteks komunikasi. Pragmatik berfokus pada bagaimana Bahasa digunakan oleh penutur dalam situasi tertentu untuk mencapai tujuan komunikasi. Menurut Djadjasudarma (dalam Nuraini, 2024), pragmatik adalah penggunaan bahasa dalam situasi tertentu, yang mengkaji makna ujaran. Pragmatik adalah ilmu bahasa yang mempelajari penggunaan bahasa manusia yang pemaknaannya dipengaruhi oleh konteks yang melatarbelakangi bahasa tersebut. Konteks ini bisa bersifat sosial, yang muncul dari interaksi dalam masyarakat, atau sosial, yang terkait dengan kedudukan individu dalam institusi sosial. Dengan demikian, konteks sosial berakar pada kekuasaan (*power*), sedangkan konteks sosial berakar pada solidaritas (*solidarity*).

Tindak tutur (*speech acts*) berfungsi sebagai sarana penindak. Hal ini berkaitan dengan bahasa/tuturan seseorang mengandung suatu maksud atau makna karena seseorang tidak semata-mata bertutur atau asal bicara Menurut Mulyana (dalam Suryawin, P, C., 2022). Istilah-istilah deskriptif untuk tindak tutur yang berlainan digunakan untuk maksud komunikatif penutur dalam menghasilkan tuturan (dalam Suryawin, P, C., 2022). Menurut Yule (dalam Ferranda, 2021) tindak tutur adalah bagian dari kegiatan tindakan yang diperlihatkan melalui tuturan. Terdapat tiga jenis tindakan yang dihasilkan sang penutur, tindakan yang dimaksud yaitu lokusi, ilokusi, serta perlokusi. Tindak lokusi, yang merupakan tindak dasar tuturan atau menghasilkan suatu ungkapan linguistik yang bermakna. Kita membentuk tuturan menggunakan beberapa fungsi di dalam pikiran ini dianggap tindak ilokusi, tindak ilokusi ditampilkan melalui fokus komunikatif suatu tuturan. Tindak perlokusi tentu kita tidak secara sederhana menciptakan tuturan yang mempunyai fungsi tanpa memaksudkan tuturan itu memiliki dampak, dengan bergantung di keadaan Anda akan menuturkan menggunakan perkiraan bahwa pendengar akan mengenali akibat yang akan dihasilkan.

Austin dan Searle mengatakan bahwa mengucapkan sesuatu berarti juga melakukan sesuatu. Kalimat, tidak hanya berfungsi untuk memberikan berita, melainkan pada hal-hal eksklusif jua berfungsi sebagai aplikasi asal tindakan itu sendiri (dalam Ferranda, 2021). Tindak tutur memiliki tujuan serta maksud tertentu guna membentuk komunikasi. Komunikasi merupakan suatu rangkaian tindak komunikatif atau tindak ujar yang digunakan secara bersistem guna menyelesaikan tujuan-tujuan eksklusif Menurut Austin (dalam Ferranda, 2021). Tujuan tindak tutur merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan pada suatu tuturan. Sebab yg dimaksud pada tujuan tindak tutur tadi yakni upaya mencapai suatu yang akan terjadi atau yang dikehendaki oleh penutur pada mitra tuturnya. Tujuannya yaitu guna menyampaikan isu, memberikan informasi, membujuk, menyarankan, memerintah, dan sebagainya. dalam hal ini seseorang penutur harus mampu meyakinkan mitra tuturnya atas maksud tuturannya (dalam Ferranda, 2021).

Kesantunan berbahasa merupakan kegiatan pemilihan kata-kata yang baik dengan memperhatikan waktu dan mitra tutur, Chaer, (Prasetya, dkk. 2020) Kesantunan berbahasa merupakan etika dalam bersosialisasi di masyarakat, sebagai contohnya penggunaan kesantunan berbahasa di lingkungan sekolah, (Prasetya, dkk. 2020). Kesantunan merupakan aturan perilaku yang ditetapkan dan disepakati bersama oleh suatu masyarakat tertentu sehingga kesantunan sekaligus

menjadi prasyarat yang disepakati oleh perilaku sosial. Secara implisit Pranowo (dalam Muslihah, 2017), menyatakan bahwa Ketika seseorang sedang berkomunikasi, hendaknya disampaikan dengan baik dan benar Juga santun dengan menggunakan kaidah kesantunan dalam setiap tindak bahasa.

Tuturan yang santun berusaha meminimalkan ungkapan yang tidak melukai hati mitra tutur, Leech (dalam Muslihah, 2017). Dalam hal ini Leech mengemukakan prinsip kesantunan berbahasa yang terdiri atas 7 maksim, yaitu: a) maksim kebijaksanaan (*tact maxim*); b) maksim kedermawanan (*generosity maxim*); c) maksim pujian (*praise maxim*); d) maksim kerendahan hati; e) maksim kesetujuan (*agreement maxim*); f) maksim simpati (*sympathy maxim*); dan g) maksim pertimbangan (*consideration maxim*). Berdasarkan ketujuh maksim tersebut, santun tidaknya sebuah tuturan dapat Dilihat dari pematuhan dan penyimpangan terhadap maksim-maksim tersebut yang selanjutnya menjadi dasar untuk menentukan skala kesantunan, (Muslihah, 2017).

Kesantunan berbahasa dalam tindak tutur Bahasa Indonesia merupakan salah satu parameter peradaban bahasa. Dalam skala yang lebih Global, kesantunan berbahasa merupakan salah satu pilar terwujudnya pendidikan damai dalam rangka membentuk manusia yang berperadaban dan bermartabat tinggi dalam berbagai bentuk komunitas. Bahkan, kesantunan berbahasa merupakan salah satu dimensi pendidikan yang perlu mendapat perhatian dalam rangka terwujudnya pengembangan pendidikan yang *sustainable*. Variasi penggunaan wujud kesantunan berbahasa menunjukkan bahwa ekspresi kesantunan berbahasa didasarkan pada tujuan dan fungsi yang beragam. Fungsi tersebut merepresentasikan adanya kekuatan yang ditimbulkan oleh penggunaan suatu ujaran, seperti perintah, pujian, ejekan, keluhan, janji, dan sebagainya. Mey, (dalam Saleh, 2012) yang selanjutnya diidentifikasi sebagai tindak ilokusi. Secara fungsional, Searle (dalam Saleh, 2012) membagi tindak ilokusi menjadi lima jenis. Pertama, tindak asertif berfungsi untuk menyatakan sesuatu agar dapat dinilai benar atau tidaknya, misalnya menyatakan, mengusulkan, membual, mengeluh, mengemukakan pendapat, melaporkan. Kedua, tindak direktif berfungsi untuk menyatakan permintaan untuk melakukan atau berhenti melakukan sesuatu, misalnya memesan, memerintah, memohon, menuntut, memberi nasihat. Ketiga, tindak komisif berfungsi untuk menyatakan sesuatu yang menunjukkan bahwa penutur sedikit banyak terikat pada suatu tindakan di masa depan, misalnya menjanjikan, menawarkan. Keempat tindak ekspresif berfungsi untuk menyatakan sesuatu yang mencerminkan sikap psikologis penutur terhadap keadaan, misalnya: mengucapkan terima kasih, mengucapkan selamat, memberi maaf, mengecam, memuji, mengucapkan belasungkawa. Kelima, tindak deklarasi mengakibatkan adanya kesesuaian antara isi proposisi dengan realitas, misalnya, mengundurkan diri, membaptis, memecat, memberi nama, menjatuhkan hukuman, dan sebagainya, Leech, (dalam Saleh, 2012).

Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun, mempertahankan, bahkan menegosiasikan kekuasaan. Dalam konteks politik, bahasa memiliki peran penting karena melalui tuturan, politisi dapat membentuk citra, memengaruhi opini publik, serta mengatur relasi sosial dan kekuasaan di tengah masyarakat. Dua penelitian yang membahas peran bahasa dalam politik secara mendalam adalah karya La Saadi dan Kasdam (2018) serta Kuntarto (2018). Keduanya menyoroti bagaimana komunikasi politik di Indonesia dipenuhi dengan dinamika kekuasaan dan strategi kesantunan yang kompleks.

Menurut La Saadi dan Kasdam (2018) komunikasi politik tidak terlepas dari aspek kesantunan berbahasa. Mereka menggunakan teori kesantunan yang dikemukakan oleh Brown dan Levinson (1987) yang menekankan pentingnya menjaga “muka” atau *face* seseorang dalam interaksi sosial. Dalam pandangan ini, terdapat dua jenis muka, yaitu *positive face* (keinginan untuk dihargai dan diterima) dan *negative face* (keinginan untuk bebas dari tekanan dan gangguan). Setiap individu, termasuk politisi, berusaha mempertahankan kedua muka tersebut melalui strategi kesantunan yang berbeda-beda.

Dalam analisis kasus Akhmad Fathanah yang dimuat di *Harian Tempo*, La Saadi dan Kasdam menemukan bahwa strategi kesantunan digunakan untuk membentuk citra politik yang baik di hadapan publik. Misalnya, seorang politisi akan menggunakan strategi kesantunan positif untuk menunjukkan kedekatan dan kesamaan nilai dengan masyarakat, atau strategi kesantunan negatif untuk menjaga jarak dan menunjukkan wibawa. Ada pula strategi *off-record*, yaitu cara berbicara secara tidak langsung untuk menghindari konfrontasi atau tuduhan. Dengan demikian, bahasa dalam politik

tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga alat untuk mempertahankan kekuasaan dan reputasi melalui kesantunan yang disesuaikan dengan situasi. Sementara itu, Kuntarto (2018) menyoroti sisi lain dari bahasa politik, yaitu bagaimana bahasa digunakan sebagai alat kekuasaan dalam wacana oposisi. Penelitian ini menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis (*Critical Discourse Analysis*) model Fairclough, yang menelaah hubungan antara wacana, ideologi, dan kekuasaan. Menurut Fairclough, setiap wacana mengandung unsur kekuasaan tersembunyi (*hidden power*) yang dapat membentuk pola pikir dan pandangan masyarakat. Dalam konteks politik oposisi di Indonesia, Kuntarto menemukan bahwa bahasa sering dimanfaatkan untuk menyindir, menyerang, dan menentang pihak lain.

Bahasa politik oposisi sering kali mengandung unsur ironi, pertentangan, perbandingan, bahkan sarkasme. Pilihan gaya bahasa tersebut mencerminkan upaya oposisi untuk membangun kekuatan politik melalui kritik tajam terhadap pemerintah. Namun, di sisi lain, penggunaan bahasa seperti ini sering kali mengabaikan prinsip kesantunan berbahasa. Kuntarto menegaskan bahwa banyak politisi oposisi menggunakan tuturan yang cenderung menyerang, menyudutkan, atau melecehkan lawan politiknya, sehingga terjadi penurunan nilai kesantunan dalam wacana publik. Dengan kata lain, dalam wacana politik oposisi, kekuasaan dihadirkan bukan melalui kesantunan, melainkan melalui kekuatan retorika dan agresivitas verbal.

Jika dibandingkan, kedua penelitian tersebut menunjukkan dua sisi yang berbeda namun saling melengkapi dalam melihat hubungan antara bahasa, kesantunan, dan kekuasaan politik. La Saadi dan Kasdam menekankan bahwa kesantunan adalah strategi untuk menjaga muka dan citra politik dalam situasi formal, sedangkan Kuntarto menunjukkan bahwa dalam konteks oposisi, kesantunan sering dikorbankan demi kepentingan politik dan kekuasaan. Dengan demikian, komunikasi kekuasaan tidak selalu identik dengan kekerasan bahasa, tetapi juga dapat hadir dalam bentuk kesantunan yang strategis.

Secara keseluruhan, kedua penelitian ini menggambarkan bahwa bahasa politik merupakan arena pertarungan simbolik. Dalam arena ini, setiap tuturan bukan sekadar penyampai pesan, tetapi juga strategi untuk mengatur relasi kuasa, membangun citra, dan memengaruhi persepsi masyarakat. Teori komunikasi kekuasaan dan kesantunan politik mengajarkan bahwa bahasa adalah kekuatan yang dapat digunakan baik untuk menjaga keharmonisan sosial maupun untuk memperjuangkan kepentingan politik tertentu. Oleh karena itu, kesadaran akan kekuatan bahasa menjadi penting agar komunikasi politik di Indonesia tidak hanya efektif, tetapi juga tetap beretika dan berkesantunan.

Dalam sistem demokrasi, kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari persepsi dan reaksi masyarakat. Kenaikan pajak merupakan isu yang sensitif karena langsung menyentuh aspek ekonomi warga. Ketika masyarakat menunjukkan penolakan, pejabat publik memiliki tanggung jawab untuk merespons secara komunikatif, tidak hanya informatif namun juga persuasif dan santun.

Di Kabupaten Pati, pernyataan seorang pejabat yang menanggapi kritik terhadap kebijakan pajak menjadi sorotan. Pernyataan tersebut tidak hanya menunjukkan sikap tegas, tetapi juga memuat strategi komunikasi yang layak dikaji secara pragmatis. Artikel ini bertujuan menganalisis tindak tutur dan strategi kesantunan dalam pernyataan tersebut untuk memahami bagaimana komunikasi politik digunakan dalam menghadapi oposisi publik.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis wacana pragmatik, yang difokuskan pada tindak tutur dan strategi kesantunan dalam komunikasi politik pejabat publik. Tujuannya adalah untuk mengungkap cara pejabat merespon penolakan kenaikan pajak melalui bahasa yang digunakan di ruang publik. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dari video di platform YouTube yang menampilkan pernyataan pejabat publik terkait penolakan kenaikan pajak. Video-video tersebut dipilih berdasarkan relevansi dan kredibilitas sumber, seperti saluran resmi pemerintah dan media berita terpercaya. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi tindak tutur berdasarkan teori Austin dan Searle, kemudian menganalisis strategi kesantunan menggunakan pendekatan Brown dan Levinson. Selanjutnya, implikasi terhadap komunikasi politik dan hubungan kekuasaan antara pejabat dan publik dikaji secara mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam konteks komunikasi politik, bahasa menjadi sarana utama bagi pejabat publik untuk menyampaikan kebijakan, membangun citra, serta mempertahankan legitimasi kekuasaan. Namun, pemilihan bentuk bahasa yang digunakan juga mencerminkan cara pejabat memosisikan diri di hadapan masyarakat. Berdasarkan analisis pragmatik dan teori kesantunan Brown dan Levinson, tuturan pejabat Kabupaten Pati yang menanggapi penolakan kenaikan pajak menunjukkan dominasi tindak tutur langsung dan strategi kesantunan yang minim, sehingga mencerminkan komunikasi kekuasaan yang tegas namun berisiko menimbulkan resistensi publik.

Pernyataan pejabat yang dianalisis adalah sebagai berikut:

“Silakan lakukan jangan hanya 5 ribu orang, 50 ribu orang pun suruh nyerang saya, saya tidak akan gentar, saya tidak akan merubah keputusan, tetap maju dan saya instruksikan semua aparat pemerintah kabupaten Pati tidak boleh ada bergiding apapun dengan saya, dan silahkan yang mau demo, silahkan, saya tidak akan mundur satu langkah pun, dan saya lakukan adalah yang terbaik untuk pembangunan kabupaten dan rakyat Pati.”

Tuturan tersebut memperlihatkan tiga bentuk tindak tutur yang utama, yaitu asertif, komisif, dan direktif.

1. Tindak tutur asertif tampak dalam pernyataan “saya tidak akan gentar” dan “tetap maju,” yang menunjukkan keyakinan penutur terhadap kebenaran kebijakan yang diambil.
2. Tindak tutur komisif muncul pada kalimat “saya tidak akan merubah keputusan,” yang menyatakan komitmen pejabat terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.
3. Tindak tutur direktif terlihat dalam kalimat “saya instruksikan semua aparat... tidak boleh ada bergiding apapun dengan saya,” yang berfungsi sebagai perintah kepada bawahan.

Dari segi strategi kesantunan, pejabat tersebut menggunakan strategi bald-on-record, yakni strategi langsung tanpa bentuk mitigasi atau ungkapan kesopanan. Menurut Brown dan Levinson (1987), strategi ini sering digunakan dalam situasi formal, ketika penutur memiliki kekuasaan yang lebih tinggi, atau ketika ingin menegaskan kontrol penuh terhadap situasi. Namun, strategi ini juga termasuk dalam *face-threatening acts* (FTA) karena berpotensi mengancam wajah sosial lawan bicara.

Tuturan pejabat tersebut mengabaikan positive face masyarakat, yakni kebutuhan untuk dihargai dan diakui pendapatnya. Selain itu, negative face masyarakat kebebasan untuk tidak ditekan atau diperintah juga terancam karena bentuk ujaran yang menantang dan otoritatif. Akibatnya, tuturan semacam ini berpotensi memunculkan konflik komunikasi dan memperlebar jarak sosial antara pejabat dan masyarakat. Dalam konteks komunikasi politik, gaya komunikasi pejabat Pati dapat dipahami sebagai upaya mempertahankan otoritas dan menunjukkan kekuatan kepemimpinan. Namun, dari sudut pandang pragmatik kesantunan, gaya ini kurang efektif dalam membangun kepercayaan dan dukungan publik. Seharusnya, pejabat publik menggunakan strategi *positive politeness* seperti memberikan pengakuan atas keresahan masyarakat atau negative politeness dengan menyampaikan kebijakan secara persuasif, sehingga komunikasi menjadi lebih inklusif dan humanis.

Dengan demikian, komunikasi politik yang efektif seharusnya tidak hanya berorientasi pada kekuasaan, tetapi juga pada etika kesantunan berbahasa. Kesantunan berfungsi untuk menjaga keharmonisan sosial dan menciptakan ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat. Pemimpin yang santun secara bahasa tidak kehilangan wibawanya, tetapi justru memperoleh legitimasi moral yang lebih kuat di mata publik.

Tabel Analisis Tindak Tutur dan Strategi Kesantunan

Aspek Analisis	Temuan Utama	Contoh dalam Tuturan	Implikasi Pragmatik
Jenis Tindak Tutur Asertif	Menunjukkan keyakinan dan keteguhan sikap pejabat terhadap kebijakan	“Saya tidak akan gentar”, “Tetap maju”	Menggambarkan citra pemimpin kuat, namun cenderung menutup ruang dialog
Jenis Tindak Tutur	Komitmen untuk	“Saya tidak akan	Menunjukkan

Komisif	tidak mengubah keputusan	merubah keputusan”	kesetiaan pada keputusan, tetapi menimbulkan kesan keras kepala
Jenis Tindak Tutur Direktif	Instruksi atau perintah kepada aparat pemerintah	“Saya instruksikan semua aparat...”	Menunjukkan kekuasaan dan hierarki yang tegas
Strategi Kesantunan (Brown & Levinson)	Bald-on-record (langsung tanpa kesantunan)	Kalimat perintah dan tantangan langsung	Mengancam wajah sosial masyarakat (face-threatening acts)
Dampak terhadap Komunikasi Politik	Menguatkan citra otoritatif tetapi melemahkan kedekatan sosial		Potensi konflik dan penolakan publik meningkat

Berdasarkan hasil analisis tindak tutur dan strategi kesantunan dalam tuturan pejabat, ditemukan bahwa pola komunikasi yang digunakan cenderung bersifat langsung, tegas, dan otoritatif. Hal ini tampak dari dominasi tindak tutur asertif, komisif, dan direktif yang disertai dengan strategi kesantunan bald-on-record, yaitu penyampaian pesan tanpa memperhalus bentuk tutur.

Pertama, tindak tutur asertif menunjukkan keyakinan dan keteguhan sikap pejabat terhadap kebijakan yang diambil. Tuturan seperti “*Saya tidak akan gentar*” atau “*Tetap maju*” mencerminkan sosok pemimpin yang percaya diri dan kuat. Namun, dari sisi pragmatik, gaya tutur ini dapat menimbulkan kesan tertutup terhadap kritik dan mengurangi ruang dialog antara pemimpin dan masyarakat.

Kedua, tindak tutur komisif yang menandakan komitmen kuat seperti “*Saya tidak akan merubah keputusan*” memperkuat citra pemimpin yang konsisten dan berpendirian teguh. Akan tetapi, secara pragmatik, hal ini dapat menimbulkan kesan keras kepala dan kurang fleksibel, terutama ketika situasi menuntut kompromi atau penyesuaian terhadap masukan publik.

Ketiga, tindak tutur direktif tampak dalam bentuk instruksi seperti “*Saya instruksikan semua aparat...*”. Tindak tutur ini memperlihatkan struktur kekuasaan yang hierarkis dan posisi dominan pejabat terhadap bawahannya. Secara pragmatik, hal ini menegaskan otoritas pemimpin, tetapi juga berpotensi mengurangi partisipasi dan inisiatif bawahan karena komunikasi berlangsung satu arah. Sementara itu, strategi kesantunan yang digunakan yaitu *bald-on-record* memperlihatkan gaya berbicara yang lugas dan tanpa basa-basi. Strategi ini efektif dalam situasi mendesak atau ketika kejelasan sangat dibutuhkan, tetapi di sisi lain dapat menjadi ancaman terhadap wajah sosial (*face-threatening acts*) masyarakat, karena mengabaikan unsur kesantunan dan empati dalam komunikasi.

Secara keseluruhan, penggunaan pola tindak tutur dan strategi kesantunan tersebut memperkuat citra pemimpin yang tegas dan berwibawa, namun di sisi lain melemahkan kedekatan sosial dengan masyarakat. Implikasi pragmatik yang muncul adalah potensi meningkatnya konflik, resistensi, atau penolakan publik terhadap kebijakan, terutama bila komunikasi politik tidak diimbangi dengan empati dan partisipasi dialogis.

SIMPULAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa tuturan pejabat Pati dalam merespon penolakan kenaikan pajak merepresentasikan komunikasi kekuasaan dengan dominasi tindak tutur asertif, komisif, dan direktif yang disampaikan secara bald-on-record. Strategi ini mempertegas otoritas politik, namun sekaligus mengancam wajah sosial publik dan mengurangi efektivitas komunikasi persuasif. Dalam perspektif teori kesantunan Brown dan Levinson, seharusnya pejabat publik menggunakan pendekatan yang lebih santun dan dialogis agar komunikasi politik tidak hanya memaksakan keputusan, tetapi juga membangun rasa saling menghargai. Kesantunan berbahasa tidak

melemahkan kekuasaan, justru memperkuat legitimasi moral dan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin.

DAFTAR PUSTAKA:

- Ferranda, F, A. 2021. Tindak Tutur Menurut Austin dalam Drama “Padang Bulan” Karya Ucok Klasta. PROSIDING SAMASTA Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia, 104-109.
- Kuntarto, E. (2018). *Bahasa dan Kekuasaan Politik Oposan di Indonesia: Analisis Wacana Kritis*. Jurnal Kiprah, 6(2), 37–47.
- La Saadi, M., & Kasdam, F. (2018). *Kesantunan Berbahasa dalam Komunikasi Politik: Beberapa Tilikan Kasus Akhmad Fathanah di Media Harian Tempo*. Paradigma: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Humaniora, 4(1), 1–10.
- Lopulalan, Y, L, D. 2023. Komunikasi Politik dalam Pemerintahan. Jurnal Hipotesa, 17(2), 11-22.
- Muslihah, N. N., & Febrianto, R. (2017). Pematuhan dan penyimpangan prinsip kesantunan berbahasa dalam wacana buku teks bahasa indonesia. Jurnal Kajian Bahasa, Sastra Dan Pengajaran (KIBASP), 1(1), 99-118.
- Nuraini, N. K. S., Noviyanti, S., & Agustina, A. T. (2024). Teori pragmatika bahasa dan kesantunan berbahasa. Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP), 7(4), 17676–17682.
- Prasetya, K. H., Subakti, H., & Musdolifah, A. (2022). Pelanggaran Prinsip Kesantunan Berbahasa Peserta Didik terhadap Guru Sekolah Dasar. Jurnal Basicedu, 6(1), 1019-1027.
- Purwanti, Y. D., Yufarlina, F., & Pancarrani, B. (2025). Pragmatik dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia: Meningkatkan Kemampuan Berkomunikasi Siswa. Saka Bahasa: Jurnal Sastra, Bahasa, Pendidikan, dan Budaya, 2(1), 21-27.
- Saleh, M., & Baharman, B. (2012). Kesantunan tindak tutur dalam interaksi akademik. Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya” Retorika”, 8(2), 123-133.
- Sampurna, A., Taufiqurrohman, A., Nasution, F, A., Dkk. 2024. Konsep dan Definisi Komunikasi Politik. Jurnal Pendidikan Tambusai, 8(2), 26772-26777.
- Suryawin, P. C., Wijaya, M., & Isnaini, H. (2022). Tindak tutur (speech act) dan implikatur dalam penggunaan bahasa. Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan, 1(3), 29-36.